

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian tentang desa wisata sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, hal ini terus berlanjut sejalan dengan munculnya berbagai fenomena dan gagasan untuk pengembangan desa wisata di Indonesia. Sehingga terdapat definisi-definisi yang mendukung dalam memberikan penjelasan terkait desa wisata atau pengembangan wisata.

#### **1.1 Tinjauan Teori**

##### **1.1.1 Definisi Pariwisata (*Tourism*)**

Pengertian Pariwisata menurut definisi yang luas adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial seperti ilmu, alam dan budaya. (Smith and French, 1994). Undang – Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berpariwisata merupakan proses bepergian sementara seseorang menuju suatu tempat di luar tempat tinggalnya. Dorongan bepergiannya dilatarbelakangi berbagai kepentingan, baik karena kepentingan sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, politik, kesehatan maupun kepentingan lain seperti menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Suwanto dalam Kurniawan, 2015).

*World Tourism Organization* (WTO) menyebutkan pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat diluar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Dari seluruh definisi yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berpergiannya orang atau kelompok menuju tempat tertentu untuk suatu kepentingan, baik itu pekerjaan, mencari hiburan atau sekedar mencari pengalaman. Tujuan tersebut dapat berupa lokasi yang memiliki daya tarik wisata (DTW) seperti alam, budaya dan buatan.

### **1.1.2 Desa Wisata (*Village Tourism*)**

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 1).

Desa Wisata (*village tourism*) menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan. (Disbudpar Kabupaten Malang, 2006).

Desa Wisata dalam Konteks Industri Pariwisata. Menurut Wiendu (1993), desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya (Chafid Fandeli, 2002).

Jadi, desa wisata dalam artian sederhana merupakan suatu obyek wisata yang memiliki potensi seni dan budaya unggulan di suatu wilayah pedesaan yang berada di pemerintah daerah. Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor.

### **1.1.3 Konsep 4A**

Daya Tarik Wisata Menurut Cooper dkk (1995: 81) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction, accessibility, amenity* dan *ancilliary*.

#### **1. Atraksi (*Attraction*)**

Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk

dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) *Natural Resources* (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW).

## 2. Fasilitas (*Amenity*)

*Amenity* atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan

prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

### 3. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

### 4. Pelayanan Tambahan (*Ancillary*)

Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan

baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *Tourist Information*, *Travel Agent* dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan.

#### **1.1.4 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan dalam meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri - industri sampingan lainnya, memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan, meningkatkan persaudaraan nasional dan internasional (Oka.A.Yoeti, 1997).

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99).

Peraturan Pemerintah 50 tahun 2011 pada pasal 2 memuat bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan

pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti: aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan (Mill, 2000).

Jadi, pengembangan wisata ialah menjadikan wisata tersebut menjadi daya tarik wisatawan, pengembangan dilakukan baik dalam obyek wisata maupun fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata tersebut. Agar obyek wisata mampu bertahan hingga masa yang akan datang.

#### **1.1.5 Strategi (*strategy*)**

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi juga dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Dengan kata lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (Jauch & Glueck, 1994).

Menurut Stephanie K. Marrus dalam Umar (2001:31), strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Hamel dan Prahalad (dalam Umar, 2001:31) strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan, dengan demikian strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang akan terjadi. Menurut Buchari Alma (1992), strategi adalah rencana-rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan (*fundamental plan of action that is intended to accomplish the company 's objectives*)

Kesimpulan dari beberapa definisi yang telah disebutkan, apabila dikaitkan dengan pariwisata, strategi memungkinkan dipilihnya tindakan – tindakan yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi suatu wisata. Sebab, strategi dapat mendorong untuk terlebih dahulu membuat perkiraan dan perhitungan mengenai berbagai kemungkinan yang bakal timbul berdasarkan hasil pengamatan dan penganalisaannya terhadap situasi dan kondisi yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

### 1.1.6 Wisata Berbasis Masyarakat/*Community Based Tourism* (CBT)

*Community Based Tourism* (CBT) adalah model manajemen kepariwisataan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya dan pada saat menciptakan dampak ekonomi yang positif. Konsep CBT bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh di lokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan wisatawan.

Anstrand dalam Janianton Damanik (2006:84) mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand mencoba melihat *Community Based Tourism* (CBT) bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi '*induced impact*' dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri (2003:14) menguatkan definisi *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. *Community Based Tourism* (CBT) merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.

Pantin dan Francis (2005:2) menyusun definisi *Community Based Tourism* (CBT) sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (*tool*) untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam dan sumber daya budaya komunitas. Demartoto dan

Sugiarti (2009:19) mendefinisikan CBT sebagai pembangunan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan menurut penulis konsep pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, control dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Kesimpulan dari beberapa definisi yang telah disebutkan, masyarakat lokal harus dilibatkan sehingga mereka tidak hanya dapat menikmati keuntungan pariwisata dan selanjutnya mendukung pengembangan pariwisata yang mana masyarakat dapat memberikan pelajaran dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah dan keunikan yang dimiliki. Hal tersebut bukan hanya memberikan keuntungan dari segi hal ekonomi namun juga sebagai langkah dalam menjaga keaslian alam dan nilai budaya yang sudah ada. Maka dari itu *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas.

### **1.1.7 Jenis – jenis Pariwisata**

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya karena ingin sekedar untuk *refreshing* dan sekedar untuk berjalan-jalan. Selain itu, ada juga yang melakukan perjalanan wisata karena ada urusan bisnis ke suatu daerah. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikelompokkan berdasarkan tujuan atau motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (1987) :

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

2. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.

## **1.2 Tinjauan Kebijakan**

### **1.2.1 Undang Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Pariwisata dikenal dengan adanya Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang - Undang ini, telah dirumuskan fungsi, tujuan, dan prinsip kepariwisataan yang menjadi landasan pembangunan kepariwisataan (meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan). Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang disusun berjenjang mulai dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi hingga kabupaten/kota (RIPPARDA). Rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) untuk RIPPARNAS dan peraturan daerah (Perda) untuk RIPPARDA. Selain itu, pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang juga dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

### **1.2.2 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Bab V Pasal 13 Ayat 2) disebutkan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk itulah perlu ditinjau juga peraturan/ undang-undang terkait, yaitu UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU No. 26 tahun 2007

dinyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penataan ruang.

### **1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)**

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 adalah Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010 – 2025. Rencana ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Rencana ini merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional dan pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam RIPPARNAS ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

### **1.2.4 RIPPARDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab. HSS ini bersumber dari dokumen Laporan Akhir *Grand Design* Pariwisata Kab. HSS tahun 2011-2021 (Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2011). Dalam rencana induk dinyatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2011-2021 adalah “*Terwujudnya pariwisata HSS yang berkelanjutan dan religius dengan daya tarik internasional*”.

### **1.2.5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 -2032**

Dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan termasuk dalam PKL dengan fungsi utama sebagai kawasan jasa pemerintahan umum skala regional

dan fungsi penunjangnya sebagai perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, kawasan militer, industri non polutan dan pergudangan dan jasa transportasi angkutan darat.

Didalamnya terdapat PKLp Loksado dengan fungsi utama sebagai pusat pariwisata skala regional dan nasional dengan fungsi penunjangnya kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan Industri dengan skala lokal. Dari sisi pola ruang, Kecamatan Loksado termasuk dalam kawasan lindung dengan seluas kurang lebih 19.955 hektar, dan kawasan resapan air seluas kurang lebih 7.490 hektar.

Loksado merupakan kawasan peruntukan pariwisata budaya lokal dan pariwisata alam. Pariwisata budaya lokal berupa Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado, sedangkan pariwisata alam seperti Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado, dan pariwisata alam lainnya. Dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga disebutkan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang didalamnya termasuk adalah Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu di Kecamatan Loksado dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang didalamnya adalah Kawasan Pariwisata Alam di Kecamatan Loksado.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dalam kebijakan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 ditetapkan kebijakan & strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang.

- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata.
- c. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan.
- d. Pengembangan agropolitan.
- e. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan.
- f. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung.
- g. Penanganan kawasan rawan bencana.
- h. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan dalam kebijakan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 terdiri atas:

- a. Mengembangkan kawasan wisata dan.
- b. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
- 1. Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. pariwisata budaya dan
  - b. pariwisata alam.
- 2. Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Wisata budaya lokal meliputi
    - 1. Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado.
    - 2. Upacara Aruh Ganal di Kabupaten.
  - b. Wisata sejarah meliputi

1. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kecamatan Loksado.
- c. Wisata religi meliputi
1. Makam Habib Lumpangi di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado.
- d. Parwisata alam sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado.
  - b. Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado.
  - c. Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado.
  - d. Gunung Kantawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado.
  - e. Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado.
  - f. Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado.
  - g. Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado.
  - h. Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kecamatan Loksado.
  - i. Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado.

#### **1.2.6 Rencana Induk dan Rencana Detail (RIRD) KSPN Loksado, kedudukan KSPN Loksado dalam arahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai**

Kedudukan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado dalam arahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan pengembangan kawasan pariwisata budaya dan alam. Dalam Pusat-pusat kegiatan rencana sistem perkotaan PKLp Loksado dengan fungsi utama sebagai pusat pariwisata skala regional dan nasional dengan fungsi penunjangnya kehutanan, perkebunan, pertanian,

peternakan, pertambangan, dan Industri dengan skala lokal. Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang.
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata.
- c. pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan.
- d. pengembangan agropolitan.
- e. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan.
- f. pemantapan dan pelestarian kawasan lindung.
- g. penanganan kawasan rawan bencana.
- h. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam uraian kebijakan penataan ruang di atas Loksado sebagai kawasan pariwisata termasuk dalam point d, e, f dan g.

1. Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan terdiri atas:
  - a. mengembangkan kawasan wisata dan.
  - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
2. Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:
  - a. menetapkan kawasan lindung.

- b. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung.
  - c. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati .
  - d. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung.
  - e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung.
  - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian kawasan lindung.
  - g. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar.
  - h. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan illegal dalam kawasan lindung dan.
  - i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan lindung.
3. Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana.
  - b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor.
  - b. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana tanah longsor.
  - c. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pengendalian banjir dan

d. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

4. Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis terdiri atas:

- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya.
- b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di kabupaten.
- c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten dan.
- b. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Dalam perwujudan pola ruang dan kawasan strategis Loksado merupakan perwujudan kawasan lindung dan budidaya.

Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung, meliputi:

- a. program rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung dan
- b. program pengelolaan kawasan lindung.

Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya meliputi:

- a. program rehabilitasi dan pengembangan hutan produksi.
- b. program pengembangan budidaya tanaman pangan termasuk yang berbasis sumberdaya lokal, hortikultura, perkebunan.
- c. program pengembangan produksi komoditas kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya).
- d. program optimalisasi produksi pertambangan.
- e. program pengembangan obyek, destinasi, dan jasa pariwisata.

- f. program penataan, pengembangan, dan pengendalian kawasan permukiman.
- g. program pengembangan kawasan perindustrian.
- h. program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dan program penyusunan studi/penelitian/perencanaan pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri.

### **1.2.7 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Penetapan desa wisata dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada dan memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang – peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja, sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Tujuan penetapan desa wisata ialah agar berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing – masing desa wisata. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan dan seni budaya masyarakat daerah serta memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Fungsi penetapan desa wisata yaitu, (1) Pengembangan sarana edukatif dan rekreasi; (2) pengembangan sarana seni dan budaya; (3) pengembangan sarana

pariwisata berbasis masyarakat; dan (3) pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata;. Kawasan desa wisata yang dijadikan proyek percontohan pengembangan desa wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satunya yaitu Desa Wisata Haratai di Kecamatan Loksado. Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan minat khusus yang difokuskan pada aspek pelestarian sumber daya alam dan potensi budaya sebagai daya tarik wisata. Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan yaitu, a. wisata agro; b. wisata alam/ekowisata; c. wisata budaya; d. wisata kuliner; dan e. wisata Tirta.

Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah – rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang strategi pengembangan wisata sudah banyak dilakukan oleh para peneliti pariwisata. Penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan gambaran tentang strategi pengembangan wisata sebagai destinasi pariwisata. Penelitian yang telah dilakukan ini dapat digunakan sebagai perbandingan untuk memperjelas dan mempertegas penelitian ini.

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan

penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. (Masyhuri dan Zainuddin, 2008: 100).

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dimuat dalam tabel dibawah ini. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian diarahkan kepada pengembangan desa wisata dengan memaksimalkan potensi yang ada seperti keunikan dan sektor unggulan sebagai daya tarik untuk wisatawan dan dikemas dengan berbagai konsep seperti desa wisata berbasis masyarakat atau berbasis kearifan lokal. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat sepenuhnya dapat berpartisipasi dan memahami dalam pengembangan desa wisata agar meminimalisir dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan wisata.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
1.	Mhd. Rizky Azhari Nasutiona, Agus Purwoko, dan Kansih Sri Hartini	Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Silimalima di Kabupaten Tapanuli Selatan	Artikel	2015	Menganalisis potensi Air Terjun Silimalima dan menganalisis masalah seiring dengan strategi pengembangan Air Terjun Silimalima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi</li> <li>• Strategi Pengembangan</li> <li>• Obyek wisata</li> <li>• Ekowisata (<i>ecotourism</i>).</li> </ul>	Matriks SWOT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase kelayakan pengembangan Air Terjun Silimalima adalah 73,72%, sehingga layak untuk dilakukan pengembangan. Hasil Analisis SWOT menunjukkan bahwa Air Terjun Silimalilma berada pada kuadran pertama yang berarti Air Terjun Siimalima berada pada posisi yang sangat menguntungkan karena kekuatannya dapat menutupi kelemahan dan ancaman serta memungkinkan untuk mengambil semua peluang.</li> </ul>
2.	Nur Adylas dan Nurlaela	Strategi Pengembangan Desa Wisata	Artikel	2018	Merumuskan strategi pengembangan desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan</li> <li>• Desa Wisata</li> <li>• Kearifan Lokal</li> <li>• Karakteristik atraksi wisata</li> </ul>	Teknik analisa deskriptif ,teknik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Tammangalle dapat dikembangkan menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal dengan potensi wisata yaitu situs</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
		Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tammangalle Polewali Mandar			berbasis kearifan lokal di Desa Tammangalle. Tujuan umum tersebut akan dicapai melalui tahapan pencapaian tujuan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi atraksi wisata</li> <li>• Faktor Pendukung</li> <li>• Faktor Penghambat</li> </ul>	analisa Delphi dan teknik analisa SWOT	<p>budaya, home industry lipa' saqbe, makanan khas Mandar yaitu golla kambu, kassippi, dan gogos, ritual adat, sifat masyarakat desa yang khas dan kental yaitu sifat yang baik, ramah, tidak kasar, suka menolong dan menerima orang baru, keindahan alam pantai, dan hasil perikanan dan perkebunan desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor pendukung pengembangan desa wisata adalah potensi wisata budaya lokal yang dimiliki Desa Tammangalle dan peran serta masyarakat yang kuat dalam peningkatan perekonomian, dan faktor penghambat pengembangan desa wisata adalah atraksi wisata yang tidak dikelola dengan baik, dukungan pemerintah, dan sarana prasarana wisata yang belum tersedia.</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi pengembangan desa wisata yang dilakukan adalah pengembangan potensi atraksi wisata berbasis kearifan lokal, pengembangan sarana dan prasarana wisata, dan spot atraksi wisata yang terintegrasi.</li> </ul>
3.	Ian Asriandy	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu di kabupaten Bantaeng	Skripsi	2016	mengidentifikasi strategi pengembangan dan implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan</li> <li>• Kebijakan</li> <li>• Program</li> <li>• Implementasi</li> <li>• strategi pengembangan yang teridentifikasi</li> </ul>	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng adalah Strategi sebagai Rencana. Adapun beberapa implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan yakni, (1) Pengembangan yang dilakukan harus terfokus pada satu titik, (2) Keterlibatan semua elemen-elemen yang terkait, (3) Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang akan dikembangkan, (4) Melakukan pelatihan-pelatihan baik

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
					beberapa dimensi-dimensi, yakni Tujuan, Kebijakan, dan Program yang akan menghasilkan suatu strategi dari beberapa definisi strategi.			pemandu wisata, pelaku wisata, dan pengelola wisata, (5) koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan obyek wisata.
4.	Selamet Joko Utomo, dan Bondan Satriawan	Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	Skripsi	2017	Merumuskan rencana strategis pengembangan desa wisata di Kecamatan Karangploso yang berbasis pada keunikan dan sektor unggulan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana strategis</li> <li>• Pengembangan desa wisata</li> <li>• Pengembangan lembaga desa</li> <li>• Keunikan sektor unggulan lokal</li> <li>• Desa Wisata berspektif go green</li> </ul>	Analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi pembentukan desa wisata di kecamatan Karangploso dengan menyajikan obyek wisata yang “berbeda” dibandingkan dengan obyek-obyek desa wisata yang telah ada di lingkup Malang Raya (Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang)</li> <li>• Berdasarkan analisis tentang potensi internal dan eksternal kecamatan</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
					(pertanian, peternakan, jasa dll) serta melalui pendekatan partisipatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keunggulan Hortikultura</li> </ul>		Karangploso kabupaten Malang, maka model desa wisata yang sesuai untuk dikembangkan adalah dengan konsep/tema “Desa wisata berperspektif <i>go green</i> yang unik, khas dan sehat yang berbasis pada keunggulan hortikultura
5.	Wedi Wirajati, Sudjarwanto dan Sukiman.	Strategi Pengembangan Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	Skripsi	2016	Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang situasi seputar pariwisata pedesaan di Limbasari baik internal maupun eksternal dan juga untuk memiliki alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekuatan daya tarik wisata</li> <li>Potensi pariwisata</li> <li><i>Rural Tourism</i></li> <li>Alternatif strategi</li> <li>Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriks SWOT</li> </ul>	Dari hasil perhitungan menggunakan Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, dan Matriks SWOT diketahui bahwa Desa Wisata Limbasari terletak pada sel ke-I Matriks IE. Pada sel tersebut mendukung pertumbuhan dan pembangunan ( <i>grow and build</i> ) berupa strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi <i>integrative</i> (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
					strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan pariwisata pedesaan di Limbasari.			horizontal). Kemudian dari hasil analisis matriks SWOT diperoleh lima strategi SO, delapan strategi WO, empat strategi ST, empat strategi WT.
6.	Aan Hidayat,	Identifikasi Potensi Dan Masalah Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata Curug Malela Kabupaten	Skripsi	2017	Menyusun arahan rencana pengembangan objek wisata Curug Malela Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi dan masalah</li> <li>• Arahan</li> <li>• Pengembangan</li> <li>• Objek Wisata</li> </ul>	Analisis SWOT	Dalam RTRW dan RIPPDA Kabupaten Bandung Barat objek wisata Curug Malela merupakan objek wisata yang diprioritaskan menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi potensi Curug Malela hingga saat ini belum dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Padahal banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata lainnya didalam objek wisata Curug

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
		Bandung Barat						Malela ini. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian Identifikasi Potensi dan Masalah dalam pengembangan objek wisata Curug Malela, guna mengetahui potensi dan masalah yang dapat mempengaruhi dalam pengembangannya
7.	Rimas Martiarini	Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturaden	Skripsi	2017	untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger Baturraden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi</li> <li>• Pengembangan desa wisata</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif Kualitatif</li> </ul>	Hasil penelitiannya adalah strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger ada 8 strategi yaitu pengkoordinasian antara pengelola desa wisata dengan masyarakat, fasilitas pemerintah memberikan pendanaan untuk mengelola desa wisata, mengembangkan atraksi wisata, mempromosikan Desa Wisata Ketenger, penyediaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil/Kesimpulan
								akomodasi, analisis program kelembagaan, pengelolaan souvenir, pengadaan fasilitas umum. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan desa wisata berfokus menuju kesejahteraan, adil, memanfaatkan lingkungan tanpa merusak lingkungan.

Sumber : Hasil Studi Pustaka, 2020

## **1.4 Best Practice**

### **1.4.1 Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) (Desa Wisata Dataran Tinggi Dieng & Desa Wisata Bejingharjo).**

#### **Dieng Plateau - Banjarnegara**

Dieng Plateau berada pada ketinggian 2093 mdpl, terletak di antara dua daerah kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Namun kali ini yang akan dibahas adalah Dieng Kulon yang tidak lain adalah wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kawasan Dataran Tinggi Dieng memiliki pesona wisata alam yang begitu indah dan *lanscape* yang mempesona. Udaranya yang sejuk serta budayanya yang khas dan terjaga baik mampu menyihir orang untuk datang. Sayangnya, kondisi tersebut banyak yang berubah. Bencana terjadi di Dieng akibat kerusakan lingkungan. Banjir bandang terjadi pada awal tahun 2000 yang merupakan dampak nyata dari salah kelola lingkungan. Rusaknya hutan lindung dan puncak gunung Perahu karena ulah masyarakat menjadi alasan yang mengakibatkan musibah ini.

Setelah musibah tersebut terjadi, telah tumbuh kesadaran petani untuk memulihkan kondisi lingkungan di Dieng melalui penanaman 5000 bibit pohon eukaliptus. Selain penyelamatan ekosistem Dieng lewat konservasi alam, juga upaya-upaya peningkatan kesadaran pengembangan pariwisata sebagai penyelamat ekosistem Dieng (Raharjana, 2010). Setelah krisis tahun 2000-an yang dirasa sangat berat, akhirnya memaksa masyarakat untuk melihat pariwisata sebagai satu alternatif yang dapat menyelamatkan perekonomian mereka pada saat itu. Tekanan lingkungan serta krisis ekonomi, keduanya menjadi pemicu kepedulian masyarakat Dieng terhadap sector kepariwisataan. Kemudian mulai

disusunnya langkah perencanaan pariwisata, seperti perencanaan desa wisata di kawasan dataran tinggi Dieng.

Semua program pembangunan termasuk sektor kepariwisataan, seperti yang dijalankan masyarakat di dataran tinggi Dieng diawali dengan perencanaan. Perencanaan pariwisata yang dikerjakan lewat metode partisipatif dengan pelibatan masyarakat secara penuh dalam prosesnya sehingga perencanaannya lebih didasarkan pada kajian – kajian terhadap masalah yang mereka hadapi serta potensi yang tersedia di dalam masyarakat (Raharjana, 2010). Masyarakat diberikan kesempatan secara penuh dalam menyampaikan permasalahan, gagasan dan masukan dalam proses perencanaan, tentunya berdasarkan kemampuan dan kapasitas masyarakat desa, dan inilah yang dinamakan perencanaan partisipatif.

Menurut riset aksi yang dilakukan oleh Destha Titi Raharjana, masyarakat Dieng Kulon diajak melakukan dua teknik perencanaan partisipatif, yaitu:

(a) pemetaan partisipatif (*participary mapping*) dan (b) menyusun diagram venn hubungan antar lembaga. Pada teknik mapping meliputi :

1. Identifikasi permasalahan;
2. Identifikasi potensi sumberdaya dan peluang pengembangannya dan
3. Identifikasi potensi pariwisata.

Sementara metode yang diterapkan selama ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi yang melibatkan elemen masyarakat, diantaranya para pengelola wisata, perwakilan pengurus desa, serta tokoh masyarakat. Kegiatan pertemuan yang diadakan secara informal ini dipandu oleh fasilitator, dan secara gender forum ini dihadiri baik laki – laki dan perempuan. Dari musyawarah bersama ini mulai diketahui bahwa ekonomi pariwisata di Dieng Kulon baru diawali dengan beberapa homestay. Kemudian berbagai usaha ekonomi penopang yang lain mulai bermunculan seperti warung makan. Fasilitator berperan untuk mengajak masyarakat untuk merefleksikan dan merancang desa wisata secara kolektifitas.

Masyarakat Dieng Kulon telah membentuk lembaga pengelola pariwisata yang diberi nama Dieng Pandawa. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini berfungsi sebagai mitra pemerintah dan menjadi fasilitator dalam pelaksanaan dan monitoring aktivitas pariwisata. Berikut beberapa kelompok kegiatan yang tergabung dalam Pokdarwis : Pokja Agrowisata, Pokja Home Industry, Pokja Souvenir, Pokja Guide, Pokja Seni Tradisional, Pokja Homestay, Pokja Fotografi. Selain Pokdarwis, diskusi warga banyak terlibat kerjasama dengan lembaga – lembaga lain terkait kepariwisataannya, diantaranya dengan lembaga berikut : Dinbudpar Provinsi Jateng, Dinaspar Kabupaten Banjarnegara & UPTD Dieng, Kementrian Pusat, Pertuguan Tinggi dan Pihak Swasta.

### **Desa Wisata Bejiharjo – Gunung Kidul**

Desa Bejiharjo yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta memiliki potensi wisata yang khas, baik alam, sejarah dan budaya. Diantaranya adalah Objek wisata Goa Pindul, Sungai Oya, Monumen Serbuan Jenderal

Soedirman. Ikon desa wisata Bejiharjo adalah Goa Pindul yang telah mampu mendatangkan wisatawan dan memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengelolaan operator lokal yaitu Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata (Rohim, 2013).

Merujuk pada tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2012 sebesar 16.05%<sup>1</sup>. Sementara itu Gunung Kidul menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di DIY<sup>2</sup>. Maka dari itu Gunung Kidul turut mengambil bagian dalam pengembangan desa wisata di DIY yang berlomba – lomba menggali potensi dan merintis desa wisata berbasis budaya, alam maupun ekonomi. Pariwisata mulai dilihat sebagai upaya alternatif yang dapat memberikan manfaat ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan Pemkab Gunung Kidul di bidang kepariwisataan ialah pengembangan destinasi pariwisata Goa Pindul atau Desa Wisata Bejiharjo. Desa Wisata yang dimulai diresmikan pada tahun 2010 ini sempat mendapat predikat Desa Wisata Terbaik se-DIY pada tahun 2012 dan penghargaan pertama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2012. Pengembangan potensi - potensi wisata tersebut tidaklah terlepas dari campur tangan pihak pengelola sebagai inisiator dalam rangka mewujudkan Desa Wisata Bejiharjo (Rohim, 2013). Dampak positif dari pengembangan desa wisata ini bisa dilihat dari pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat yang tadinya bermatapencarian bertani sekarang juga mendirikan warung yang menjual makanan khas dan souvenir, menjadi jasa ojek di sekitar lokasi wisata, dan menjadi pemandu wisata.

Desa Wisata Bejiharjo dikelola oleh dua pengelola yaitu Pokdarwis Dewa Bejo dan Pokdarwis Wira Wisata. Munculnya dua pengelola ini dimungkinkan karena adanya dua pintu masuk kawasan yang berbeda. Menurut tabloid Flamma (2012) di level kelembagaan pengelolaan desa wisata goa pindul sejauh ini sebenarnya masih diliputi oleh konflik. Kenyataan ini membuat kepala desanya turun tangan menyiapkan Perdes. Dengan adanya perdes pengelolaan wisata goa pindul bisa terselesaikan menjadi satu. Dalam rancangan perdes, Pokdarwis Dewa Bejo dan Wira Wisata itu hanya ditempatkan sebagai pintu pelayanan, tetapi organisasi pelaksanaanya hanya satu saja. Keberadaan Goa Pindul sejauh ini telah melahirkan konflik. Jika potensi konflik tidak terselesaikan bagaimana mungkin distribusi kesejahteraan akan bisa diwujudkan.

Dari hasil pengamatan terapan pariwisata berbasis komunitas (CBT) di dua desa wisata yang berbeda, kemudian dapat disimpulkan beberapa kesamaan dari penerapan CBT di Desa Wisata Dataran Tinggi Dieng dan Desa Wisata Bejiharjo.

1. Keduanya sama - sama melihat pariwisata sebagai suatu alternatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Keduanya sama - sama memanfaatkan potensi alam wilayahnya, kearifan lokal dan budaya setempat, serta cara hidup masyarakatnya untuk aktivitas pariwisata.
3. Keduanya, juga mendapat dukungan dari pihak - pihak terkait seperti dari Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Kementrian Pariwisata, Akademisi dan Pihak Swasta.

4. Dalam pengembangan desa wisata, keduanya menerapkan serangkaian aktivitas pemberdayaan masyarakat, atau yang disebut dengan metode partisipatif.
5. Di tingkat komunitas, keduanya juga sudah membentuk pengelola pariwisata berbasis desa, atau yang disebut dengan Pokdarwis.

Selain melihat persamaan dari kedua desa wisata ini, perlu diperhatikan juga praktek CBT yang bisa dikatakan lebih berhasil. Penulis menyimpulkan praktek CBT desa wisata dataran tinggi Dieng lebih berhasil, dimana metode partisipatif dari masyarakat setempat diterapkan sejak awal ditahap perencanaan. Sementara bagi desa wisata Bejiharjo menunjukkan bahwa praktek CBT bukan berarti tanpa resiko. Konflik pengelolaan menjadi indikasi terhadap potensi ekonomi yang diperebutkan. Bahkan, soal pemerataan ekonomi dari keuntungan desa wisata masih dalam tahap perencanaan (Rahman, 2012), padahal aktivitas desa wisata sudah berjalan lebih jauh. Konflik yang terjadi di desa wisata Bejiharjo adalah konflik antara dua kepemilikan pengelolaan desa wisata, serta konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola (pokdarwis) yaitu ketidakpercayaan atas sistem kelola yang selama ini diterapkan.

Pengembangan desa wisata disatu sisi sangat positif, namun juga perlu diwaspadai pada sisi lainnya justru mengundang potensi konflik sosial di lingkungan desa. Tidak semua bagian dari masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dari adanya desa wisata. Kenyataan tersebut sangat potensial melahirkan kekacauan sosial di lingkungan desa. Untuk menghindari problematika

tersebut ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata, diantaranya :

1. Tujuan pembangunan desa wisata adalah meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan segelintir orang.
2. Dibutuhkan regulasi pemerataan kesejahteraan
3. Diperlukan evaluasi, koreksi dan pemetaan perencanaan yang lebih serius.

Analisa dari dua kasus desa wisata ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, hal yang paling penting dari pariwisata berbasis masyarakat adalah penekanan pada partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata. Paradigma *Bottom Up Planning* diharapkan dapat mengangkat peran masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Masyarakat akan selalu menjadi unsur yang tak terpisahkan dari prinsip - prinsip pariwisata yang berkelanjutan.

